

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR BALIKPAPAN

EDISI JUMAT
8 SEP 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



WALI KOTA: JANGAN ASAL BAKAR LAHAN



**DPRD KOTA BALIKPAPAN DAN UGM
GELAR FGD PENYUSUNAN KAJIAN
DAN NASKAH AKADEMIK**



Wakil Ketua III DPRD Balikpapan, Subari

DPRD KOTA BALIKPAPAN DAN UGM GELAR FGD PENYUSUNAN KAJIAN DAN NASKAH AKADEMIK

BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Akademik dan Naskah Akademik di Hotel Novotel, Kamis (7/9/2023).

Bersama Universitas Gajah Mada, FGD membahas penyusunan 5 pembahasan, yakni 3 kajian akademik tentang wawasan kebangsaan cinta tanah air, penanggulangan masalah sampah pesisir, dan pembentukan museum sejarah.

Sementara 2 naskah akademik yakni membahas Penjelasan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Perda Nomor 4/2018 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Manuntung Sukses dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Wakil Ketua III DPRD Balikpapan, Subari mengatakan, kegiatan FGD ini berlangsung mulai 7-8 September 2023 dengan narasumber dari para akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM).

"FGD ini merupakan bentuk kepatuhan pada Peraturan Pemerintah nomor 12/2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib

DPR," ujarnya usai membuka FGD.

Subari menjelaskan, dalam peraturan tersebut disebutkan pasal 5 bahwa Raperda berasal dari DPRD atau Kepala Daerah, di mana rancangan itu disertai penjelasan atau keterangan atau naskah akademik.

"Karena itu, DPRD Balikpapan bekerja sama dengan penyusun dari UGM agar dapat menyusun Raperda yang disertai naskah akademik, penjelasan dan kajian untuk menjawab kebutuhan masyarakat Balikpapan," jelasnya.

Subari berharap melalui FGD ini ada peran aktif dari peserta undangan, selaku dari pihak yang berkaitan dalam tema kajian dan naskah akademik.

"Kami berharap tamu undangan dapat memberi banyak saran agar kami melakukan hasil pengkajian dan bahan-bahan Raperda yang komperhensif, akomodatif dan aplikatif, sehingga kegunaannya positif oleh seluruh lapisan masyarakat," tutupnya. (adv)

Pewarta : Apriant

Editor : Nicha Ratnasari



Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Balikpapan.

WALI KOTA BALIKPAPAN MINTA WARGA TIDAK ASAL MEMBAKAR LAHAN

BALIKPAPAN - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat ini telah menjadi ancaman di berbagai wilayah Kalimantan Timur, termasuk di Kota Balikpapan. Pasalnya, saat ini mengalami musim kemarau panjang yang disebabkan oleh fenomena el nino.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud pun mengimbau warga Kota Balikpapan untuk tidak membakar lahan secara sembarangan. Menurutnya, tindakan membakar lahan sembarangan dapat memperburuk potensi bencana Karhutla.

"Jangan sembarangan membakar hutan, apalagi sekarang kondisinya sedang kemarau," ujarnya.

Rahmad menjelaskan, untuk mengatur masalah ini harus ada

regulasi perizinan yang harus diajukan bagi masyarakat yang ingin membuka lahan.

"Sehingga kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi bisa dihindari, termasuk karhutla," jelasnya.

Banyak hal negatif yang harus diperhatikan ketika seseorang ingin membuka lahan dengan cara membakar. "Karena dalam hutan itu ada makhluk hidup di dalamnya. Adanya karhutla itu, habitat ikut menjadi rusak," tambahnya.

Rahmad Mas'ud juga mengimbau kepada seluruh personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menggenarkan sosialisasi kepada masyarakat di Kota Balikpapan.

"Dengan bersinergi untuk mengedepankan faktor keaman-

an dalam kehidupan sehari-hari," tambahnya.

Hingga September 2023 ini BPBD Kota Balikpapan mencatat ada 48 kasus karhutla di Kota Balikpapan. Jumlah kasus karhutla tersebut diketahui berkategori mulai dari tingkat kebakaran kecil, sedang dan besar.

"Ada dua faktor pemicu bencana karhutla, yakni adanya pembukaan lahan dan fenomena alam," ujar Plt. BPBD Balikpapan, Usman Ali.

Adapun kebakaran lahan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dalam hal pembukaan lahan, menjadi faktor yang paling dominan pada bencana karhutla.

Penulis: Apriant

Editor: Nicha Ratnasari



Simulasi Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Balikpapan Sport Convention Center (BSCC) Dome Balikpapan pada Kamis (7/9/2023).

BALIKPAPAN SIAP SIAGA HADAPI KARHUTLA

BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar apel Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Balikpapan Sport Convention Center (BSCC) Dome Balikpapan pada Kamis (7/9/2023).

Plt. Kepala BPBD Kota Balikpapan, Usman Ali mengatakan, sesuai arahan Wali Kota dalam rangka penanganan kebakaran lahan dan hutan, pihaknya diarahkan dan diperintahkan untuk bersiaga.

"Kami siapkan 6 Pos di setiap kecamatan di UPT masing-masing, ditambah dengan 2 Pos pembantu dengan Posko PB, jadi semuanya ada 9 Pos yang ini regulasi standby 24 jam," ujarnya.

Lebih lanjut Usman Ali menjelaskan, beberapa titik rawan terjadinya bencana Karhutla di antaranya wilayah Balikpapan Barat, Balikpapan Timur dan beberapa

pinggiran jalan Tol Balikpapan-Samarinda.

"Mudahan kita bisa sama-sama peduli akan bencana karhutla, dengan tidak melakukan bakar-bakar, baik itu sampah dan lahan sembarangan," jelasnya.

Hingga September 2023 ini BPBD Kota Balikpapan mencatat ada 48 kasus Karhutla yang terjadi di Kota Balikpapan. Jumlah kasus Karhutla tersebut diketahui berkategorikan mulai dari tingkat kebakaran kecil, sedang dan besar.

"Ada dua faktor pemicu bencana Karhutla, yakni adanya pembukaan lahan dan fenomena alam," tambahnya.

Adapun kebakaran lahan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal pembukaan lahan, menjadi faktor yang paling dominan pada bencana karhutla.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Salah satu inverter yang berada PLTS Atap yang berada di PT PHM. (Istimewa)

TRANSISI ENERGI, UPAYA KURANGI EMISI "JELAJAH ENERGI KALTIM" (1)

MANFAATKAN PLTS, PHM MAMPU KURANGI KETERGANTUNGAN LISTRIK PLN DI SIANG HARI

BALIKPAPAN - Upaya transisi energi, memanfaatkan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT), sudah dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di OFG Balikpapan Base Office (BBO). Diketahui, PT PHM menggunakan PLTS tipe On Grid.

General Manager PT PHM, Setyo Sapto Edi, melalui Assistant Manager General Service, Ruslan Rachim menjelaskan pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari ini sudah mulai beroperasi sejak 2014 lalu. Dengan masa pembangunan selama setahun sejak 2013. Keterbatasan lahan, menjadi alasan PT PHM memilih atap perkantoran sebagai lokasi memasang 430 unit panel solar.

Dengan ratusan panel yang terpasang, mampu mendukung kelistrikan salah satu gedung selama 12 jam penuh. Sebaliknya, kembali menggunakan listrik dari jalur PLN. Bahkan, dengan pemakaian yang ada, Ruslan mengklaim masih surplus dan mampu mengaliri listrik gedung lainnya. Di mana rata-rata energi listrik yang dihasilkan tiap bulannya mencapai 2.067 kWh, dari target 1.483 kWh.

Dengan asumsi, energi solar cell rata-rata perhari mencapai 414,6 kWh. Dengan pro-

duksi energi rata-rata sebesar 34,4 kWh, dan konsumsi listrik yang digunakan 21 kWh.

"Kita (PHM) mampu ciptakan efisiensi emisi sebesar 861,1 ton CO₂," ungkap Ruslan, Rabu (6/9/2023).

Dengan inovasi dan langkah konkret yang dilakukan PT PHM dalam rangka menurunkan emisi karbon, Ruslan menyebut PLTS Atap Off Grid ini akan dipastikan masuk dalam inovasi Green Building Certified garapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sementara itu, Alvin Sisdwignugraha, analis Institute for Essential Service Reform (IESR), mengapresiasi langkah transisi energi dari Sumber Daya Alam (SDA) fosil ke sumber EBT. Bahkan mendorong langkah serupa yang lebih masif lagi, ke beberapa gedung perkantoran lainnya. Baik itu terpasang diatas atap, maupun di atas hamparan lahan (ground-mounted) dengan skala yang lebih besar pula.

"Pemanfaatan PLTS ini tak hanya berpotensi mengurangi biaya operasional dari konsumsi listrik, namun juga menegaskan komitmen terhadap pengembangan EBT," pungkas Alvin.

Penulis : Muhammad Rafii
Editor : Nicha Ratnasari



Pengelola UPTD TPAS Manggar saat menunjukkan pemanfaatan gas metana untuk kebutuhan rumah tangga. (Rafii/Media Kaltim)

TRANSISI ENERGI, UPAYA KURANGI EMISI "JELAJAH ENERGI KALTIM" (2) BERKAH TUMPUKAN SAMPAH, PENGOLAHAN GAS METANA TPAS MANGGAR MENGALIRI 305 SAMBUNGAN RUMAH TANGGA

BALIKPAPAN - Pemanfaatan biogas sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT), sudah dilakukan oleh Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Manggar, Balikpapan. Memanfaatkan gas metana yang keluar dari tumpukan sampah yang mengggung. Setidaknya di enam zona penumpukan sampah yang ada.

Memang TPAS yang terletak di RT 36 Jalan Proklamasi, Kelurahan Manggar, ini mulai memanfaatkan gas metana sejak 2012 atau 10 tahun sejak resmi digunakan untuk menampung sampah Kota Balikpapan.

Sampah yang menumpuk dari zona 1 hingga zona 6, akan ditangkap gas metananya melalui pipa yang dipasang secara vertikal, dari dasar tumpukan sampahnya. Diketahui, secara biologis tumpukan sampah akan mengeluarkan air pembusukan yang dinamakan Air Lindi. Kemudian diolah dan diproses melalui Leachate Treatment Plant atau Instalasi Pengolahan Air Lindi (IPAL).

"Awalnya digunakan penerangan di TPAS Manggar dan sedikit warga sekitar," ungkap

Muhammad Hariyanto, kepala UPTD TPAS Manggar, dalam rangkaian kegiatan transisi energi garapan Institute for Essential Service Reform (IESR).

Melihat potensi sumber EBT ini, menarik minat Pertamina Hulu Mahakam (PHM) untuk menggelontorkan bantuan berupa Corporate Social Responsibility (CSR), pada tahun 2018 silam. Hasilnya, tak hanya dimanfaatkan penerangan TPAS Manggar saja. Kini, gas metana hasil pengolahan di TPAS Manggar sudah dinikmati 305 sambungan rumah tangga. Bahkan ada warga sekitar yang merupakan UMKM, turut menikmati saluran gas metana ini.

Itupun hanya dipungut Rp 10 ribu tiap bulan, tiap sambungan rumah tangga. Itu pun kembali dimanfaatkan secara swadaya oleh kelompok yang sudah dibentuk. Entah itu digunakan untuk perawatan infrastruktur sambungan ke rumah-rumah warga.

Kembali lagi, jika berbicara nilai ekonomisnya, warga sangat merasa terbantu dengan adanya potensi EBT gas metana ini. Dengan asumsi pertabungnya sehar-

ga Rp 30-35 ribu ditingkat eceran, sangat membantu mengurangi pengeluaran warga. Terutama bagi pelaku UMKM, apalagi gas LPG 3 kg yang sempat melambung tinggi hingga Rp 40-45 ribu saat adanya kelangkaan.

"Warga hanya iuran Rp 10 ribu yang dibayar kepada kelompok swadaya masyarakat atau RT sekitar TPAS Manggar," lanjut Hariyanto.

"Dari tahun 2020 sampai sekarang tercatat 960 ribu meter kubik gas metana yang mengalir ke rumah-rumah warga," pungkasnya.

Sementara itu, Manajer Penelitian IESR, Julius Christian, menyebutkan pemanfaatan gas metana turut mengurangi jumlah emisi atau efek Gas Rumah Kaca (GRK) yang berdampak pada sisi lingkungan. Disamping memberikan bahan bakar gratis bagi warga di sekitar TPAS Manggar.

"Selain itu, pemanfaatan gas metana ini juga mengurangi terjadinya akumulasi gas di timbunan sampah yang berpotensi menyebabkan ledakan dan longsor," tutupnya.

Penulis : Muhammad Rafi
Editor : Nicha Ratnasari



BBJP dan Woodchip yang diproduksi TPAS Manggar untuk bahan baku Co-Firing. (Rafi'i/Media Kaltim)

TRANSISI ENERGI, UPAYA KURANGI EMISI "JELAJAH ENERGI KALTIM" (3)

PASOK BAHAN BAKU CO-FIRING PLTU, TPAS MANGGAR PRODUKSI WOODCHIP & BBJP

BALIKPAPAN - Produk "sampah" yang berada di Tempat Pembuangan Akhir Sementara (TPAS) Manggar, Balikpapan, tidak hanya dimanfaatkan oleh pengelola dalam menghasilkan gas metana saja. Namun juga memanfaatkan limbah sampah organik berupa potongan pohon dan dedaunan.

Dijelaskan UPTD TPAS Manggar, Muhammad Hariyanto, pun mengatakan menjadikan limbah pohon dan dedaunan menjadi bahan bakar Co-Firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Kaltim Teluk Balikpapan.

Yakni sejak 2022 lalu, menjalani kerjasama dengan memasok bahan baku berupa cacahan kayu atau Woodchip yang berasal dari bagian batang kayu. Juga Bahan Bakar Jemputan Padat (BBJP) yang berupa pelet hasil olahan fermentasi sampah

dedaunan. Tentunya ini juga sebagai langkah TPAS Manggar untuk mengurangi jumlah sampah di sana.

"Mulai operasional akhir Juni 2022 sudah mulai produksi berupa pelet dan cacahan kayu," ungkap Hariyanto.

Sudah berjalan setahun lebih, UPTD TPAS Manggar, sudah secara stabil memproduksi 5-10 ton Woodchip dan BBJP untuk dipasok ke PLTU PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Kaltim Teluk Balikpapan, tiap bulannya. Dengan kontrak kerjasama Rp 400 per kilogram, maka UPTD TPAS Manggar menghasilkan Rp 2-4 juta perbulan yang masuk dalam kas APBD Balikpapan.

"Seiring berjalannya waktu, TPAS Manggar terus meningkatkan kapasitas produksi pelet dan BBJP-nya," tutupnya.

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



UJUNG MASA JABATAN, HAMDAM MUTASI 193 PEJABAT



SETELAH GUNADARMA,
GILIRAN UNPAR BANDUNG
RENCANA BANGUN KAMPUS DI PPU



Bupati PPU Hamdam Pongrewa bersama Rektor Unpar Bandung Tri Basuki Joewono saat seremonial peletakan batu pertama pembangunan, Kamis (7/9/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

SETELAH GUNADARMA, GILIRAN UNPAR BANDUNG RENCANA BANGUN KAMPUS DI PPU

PPU - Setelah kampus Universitas Gunadarma resmi hadir di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), kali ini giliran Universitas Parahyangan (Unpar) yang berencana melaksanakan pembangunan gedung di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.

Pembuktian itu dimulai dengan peletakan batu pertama pembangunan asrama mahasiswa dan fasilitas pendidikan perguruan tinggi yang berpusat di Bandung, Jawa Barat itu. Gedung itu nantinya akan berada di Jalan Pipa Pertamina, Kilometer 8 Nipah-Nipah, Kamis, (7/9/2023).

Rektor Unpar, Tri Basuki Joewono mengatakan dirinya berharap kegiatan tidak berhenti sampai di sini. Agar segera proses aktivitas pengembangan sumber daya manusia (SDM) Benua Taka segera terwujud.

"Dalam tahapan pembangunan Unpar, sesungguhnya kami telah melalui proses yang cukup panjang," ujarnya.

Di antaranya terkait proses perizinan pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU). Termasuk proses pengajuan-pengajuan proposal instrument untuk memasukan izin pembukaan prodi.

Untuk tahap awal, Unpar rencananya nanti akan membuka tiga program studi (prodi) di ka-

bupaten PPU. Masing-masing Ilmu Administrasi publik, Administrasi Bisnis dan Hukum.

Alasannya ialah mempertimbangkan bahwa pusat pemerintahan IKN akan sangat membutuhkan ahli-ahli ilmu di bidang tersebut.

"Yang diperlukan untuk warga adalah ilmu yang berhubungan agar bisa berkontribusi secara nyata di pusat pemerintahan IKN dengan ilmu-ilmu tersebut. Sehingga diharapkan pada 2024 pihaknya sudah bisa menerima dengan tiga prodi yang ada tersebut," jelas Tri.

Sementara itu, Bupati PPU Hamdam menyebutkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) PPU sudah menjadi keniscayaan yang harus dilakukan. Khususnya dalam rangka menyambut pemindahan pusat negara Republik Indonesia di Kaltim.

"Kami menyadari betul bahwa SDM Kita ini mungkin dapat dikatakan masih rendah walaupun ada juga yang telah mampu bersaing dengan pendatang dari luar PPU," katanya.

Ia menilai, hadirnya Unpar yang merupakan salah satu universitas swasta memiliki akreditasi unggul di Indonesia. Walaupun memiliki dasar agama tertentu, ia menjamin sesungguhnya universitas ini diperuntukkan untuk mahasiswa umum.

"Tetapi sebagian besarnya pas-tilah belum mampu bersaing sehingga pemda harus melakukan sesuatu. Harus ada upaya bagaimana menyiapkan tempat untuk putra-putri daerah ini agar bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau," sambungnya.

Maka dari itu, kehadirannya di PPU tentulah perlu diapresiasi. Sebab, hanya di PPU Unpar Bandung berminat mendirikan kampus dan yayasan di daerah lain.

"Ini satu penghargaan bagi kami. Karena Unpar ini satu-satunya pengelolaan PSDKU ada di PPU," sebut Hamdam.

Harapannya, pembangunan yayasan tersebut prosesnya dapat berjalan lancar dan tidak terlalu lama. Bahkan jika memang memungkinkan pada 2024 mendatang sudah bisa menerima mahasiswa baru.

"Ini adalah kampus kedua di PPU, setelah sebelumnya telah diresmikan Universitas Gunadarma beberapa waktu lalu. Harapan kita, langkah-langkah Pemerintah Daerah melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia ini mampu meningkatkan SDM Kita ke arah yang lebih baik, dalam rangka menyongsong pembangunan IKN ke depan," tutup Hamdam.

Pewarta : Nur Robbi
Editor : Nicha Ratnasari



Bupati PPU, Hamdam Pongrewa saat pelantikan dan pengambilan sumpah 193 pejabat di posisi baru, Kamis (7/9/2023).
(Robbi/MediaKaltimGroup)

UJUNG MASA JABATAN, HAMDAM MUTASI 193 PEJABAT

PPU - Di ujung masa baktinya menjadi Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam Pongrewa masih sempat melakukan mutasi jabatan terhadap 193 pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional di lingkungan Pemkab PPU, Kamis (7/9/2023).

Seperti diketahui, masa jabatan kepemimpinannya akan berakhir pada 19 September 2023 mendatang. Hal ini dilakukannya murni untuk menciptakan peningkatan mutu *good governance*.

Hamdam mengatakan pengembangan karier pegawai tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan. Melainkan tapi lebih dari itu, pelantikan untuk pembenahan dan pematapan organisasi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan kinerja pelayanan publik.

"Saya berharap kepada seluruh pejabat yang telah dilantik agar segera melaksanakan tugas se-

baik-baiknya menjunjung tinggi profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya," katanya.

Ia juga menginstruksikan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dengan cepat menyesuaikan diri pada unit kerja masing-masing. Guna memastikan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan waktu yang telah ditentukan.

"Kerja keras dan karya nyata sangat menentukan keberhasilan program dan kegiatan pada satuan kerja. Perlu dan wajib diingat bahwa, jabatan adalah ujian dan yang diberi ujian wajib lulus dengan nilai yang terbaik," lanjutnya.

Untuk diketahui pula, rotasi jabatan yang dilaksanakan di Aula Lantai 1 Islamic Center Penajam, Kilometer 9 Nipah-Nipah ini merupakan ke-4 kali dilakukan dalam masa kepemimpinan Hamdam. Sebelumnya pada Januari 2023 dengan melantik 135

pejabat di posisi baru.

Kemudian Maret 2023, yang terdiri dari 12 pejabat di tataran eselon II. Lalu pada Juli 2023, yang berisikan 10 jabatan tinggi pratama (JPT) di lingkungan Pemkab PPU.

Lebih lanjut, Hamdam pada momentum ini juga mengingatkan untuk seluruh pegawai dapat melakukan *intropeksi*. Lalu berupaya semaksimal mungkin untuk terus memberikan inovasi pelayanan yang paripurna.

"Apakah kontribusi sudah maksimal dan sebanding dengan apa yang telah masyarakat PPU berikan."

"Niatkan kembali diri kita untuk lebih bekerja dengan ikhlas serta penuh inovasi demi mewujudkan birokrasi yang bersih, masyarakat dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Pewarta : Nur Robbi
Editor : Nicha Ratnasari



WARGA TUTUP JALAN BATU BARA & GALIAN C LEGAL DI KUKAR



**EDI DAMANSYAH KUNJUNGI
LOKASI KEBAKARAN MUARA KAMAN
SEKALIGUS SERAHKAN BANTUAN**



Warga Desa Batuah, Kukar, Menutup Jalan yang Sering Dilalui Kendaraan Batu Bara dan Galian C Ilegal

WARGA TUTUP JALAN BATU BARA & GALIAN C ILEGAL DI KUKAR

KUKAR - Masyarakat di Desa Batuah, Dusun Karya Baru, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara menutup jalan sepanjang 2 kilometer 100 meter yang selama ini dijadikan jalur kendaraan batu bara dan galian C ilegal pada Kamis (7/9/2023).

Penutupan jalan ini masih bersifat semi permanen, dengan menggunakan kayu batang pohon akasia selebar kurang lebih 6 meter yang ditancapkan ke tanah.

Salah satu perwakilan warga, Gabriel Philipus Assan, mengatakan bahwa jalan yang dimiliki oleh warga bernama Welly Susanto tersebut sudah digunakan sebagai jalur kendaraan (jalan hauling) batu bara oleh CV. Anggaraksa Adisarana sejak tahun 2017 hingga saat ini.

"Sudah pernah ada pertemuan antara ahli waris dengan pihak tambang. Sudah ada 3 kali pertemuan tapi tidak ada hasilnya," tegasnya.

Lebih lanjut, Gabriel Philipus Assan menjelaskan bahwa pihaknya hanya menuntut kompensasi selama digunakan

sebagai jalur kendaraan batu bara atau dibeli dari ahli waris.

"Sejak 2017 sampai saat ini tidak ada kompensasi yang kita dapat. Atau kalau mau, ya dibeli saja lahan ini. Dan ini sudah kami sampaikan ke pihak tambang itu," jelasnya.

Ditambahkan Gabriel, yang menjadi permasalahan, galian C pasir putih ilegal sudah pernah beberapa kali dilaporkan ke pihak berwajib, dalam hal ini ke Polsek Loa Janan dan Polres Kukar, namun laporan tersebut tidak mendapat tindak lanjut.

"Sudah pernah kami buat laporan. Tapi sampai saat ini tidak tahu kenapa tidak ada tindak lanjutnya," tambahnya.

Dari pantauan media ini di lokasi, saat dilakukan penutupan jalan tersebut, sudah tidak terlihat aktivitas kendaraan batu bara yang melintas. Bahkan kendaraan truk yang biasanya mengangkut pasir putih di galian C ilegal juga sudah tidak terlihat. **(Bom)**

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto



Bupati Kukar, Edi Damansyah (Ady/Radar Kukar)

EVALUASI PENYALURAN BANSOS, EDI MINTA PROSES VERIFIKASI DTKS LEBIH OPTIMAL GUNA TEPAT SASARAN

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan evaluasi pelaksanaan bantuan sosial (bansos) di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Kamis (7/9/2023). Hal ini sebagai tindak lanjut dari aksi strategi nasional pencegahan korupsi di wilayah Kukar.

Bupati Kukar, Edi Damansyah menerangkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemkab Kukar atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kementerian Sosial (Kemensos). Di mana terdapat temuan BPK dalam penyaluran bansos di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.]

"Temuannya itu ada ASN yang menerima penyaluran bansos, ada juga warga yang

secara pendapatan masuk kategori menengah tapi menerima," terang Edi Damansyah, saat dijumpai usai Rakor.

Penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran ini, disinyalir karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diberikan oleh Kemensos belum diverifikasi dengan baik. Oleh sebab itu, Edi menekankan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan verifikasi DTKS dengan lebih rinci.

Mengingat pada tahun 2022 lalu, Pemkab Kukar telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap DTKS. Di mana didapati bahwa 34 persen penerima bansos tidak berhasil ditemukan, atau bahkan terkategori mampu.

"Nah ini yang saya pesankan, makanya perintah saya itu kan optimalisasi tugas Dinas Sosial

(Dinsos)," tegas Edi.

Ia menekankan perlu adanya pembagian peran antara Kepala Desa (Kades) dan Lurah, camat dan termasuk Dinsos di tingkat kabupaten dalam proses verifikasi DTKS.

Edi tidak ingin temuan serupa terus berulang, apalagi penyaluran bansos ini dilakukan setiap bulan. Dan, pada bulan September ini DTKS harus sudah diverifikasi. Mengingat datanya harus diajukan untuk penerima program sosial untuk bulan ini.

"Pekerjaan ini sebetulnya pekerjaan rutin, cuman kan menjadi kurang diperhatikan. Makanya ini saya minta diperhatikan, karena persoalan data ini sangat penting," pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha Ratnasari



Bupati Kukar Edy Damansyah, saat menyalurkan bantuan pada korban kebakaran di Muara Kaman (Istimewa)

EDI DAMANSYAH KUNJUNGI LOKASI KEBAKARAN MUARA KAMAN SEKALIGUS SERAHKAN BANTUAN

TENGGARONG- Kebakaran hebat menghancurkan 18 rumah dan 5 bangunan sarang burung walet di Desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman pada Rabu (6/9/2023) kemarin. Mengakibatkan 21 kepala keluarga yang terdiri dari 88 jiwa harus kehilangan tempat tinggal.

Diketahui peristiwa ini terjadi sekitar pukul 16.20 Wita. Api berhasil dipadamkan oleh padam kebakaran bersama dengan para relawan serta warga setempat pada pukul 17.45 Wita. Diperkirakan kerugian yang dialami korban akibat kejadian ini mencapai angka Rp 4 miliar.

Kurang dari 24 jam pasca kejadian ini, para korban kebakaran langsung menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar).

Pada pagi hari tadi, Kamis (7/9/2023), Bupati Kukar Edy Damansyah langsung mengunjungi lo-

kasi kejadian. Untuk memberikan bantuan secara langsung kepada korban terdampak kebakaran.

Ia menyalurkan bantuan berupa kompor gas, tabung gas, selimut, terpal, minyak goreng, mie instan, perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa, dan lainnya. Sekaligus menyerahkan bantuan mesin pompa portable dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) Kukar.

"Bantuan yang kami salurkan ini mudah-mudahan bisa meringankan beban saudara kita yang baru saja terkena musibah," kata Edi.

Edi menambahkan, bantuan yang disalurkan ini merupakan bentuk kepedulian Pemkab Kukar. Menurutnya, membantu sesama merupakan sebuah kewajiban, sudah selayaknya saling membantu jika saudara kita terkena musibah. Sebagaimana slogan pembangunan di era Edi

Damansyah dan Rendi Solihin "Betulungan Etam Bisa"

Ia juga berharap, para korban kebakaran ini diberikan ketegaran dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Sebab ia meyakini selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa.

"Harus kita kembalikan bahwa kita punya keyakinan, di balik musibah ini pasti ada hikmahnya dari yang maha kuasa," tambahnya.

Terakhir, Edi Damansyah secara pribadi dan mewakili jajaran Pemkab Kukar. Turut mengucapkan rasa belasungkawa atas peristiwa yang menimpa masyarakat di RT 06 dan RT 07 Desa Muara Kaman Ulu kemarin.

"Saya turut menyampaikan berbelasungkawa, berduka dan turut merasakan apa yang bapak ibu rasakan," pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha Ratnasari



ANDI FAIZ DUKUNG POLISI BERANTAS OKNUM PENIMBUN DI TENGAH ISU KENAIKAN BBM

BACA HALAMAN A2



Majukan Wisata, BW Sarankan
Pemkot Bentuk Badan Promosi
Pariwisata Daerah
BACA HALAMAN A3



Junaidi

Andi Faizal S Hasdam

Agus Haris SH

Yessy Waspo

WAKIL KETUA

KETUA DPRD

WAKIL KETUA

SEKRETARIS DPRD

DPRD KOTA BONTANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Ilustrasi SPBU di Bontang.

Andi Faiz Dukung Polisi Berantas Oknum Penimbun di Tengah Isu Kenaikan BBM

BONTANG – Ketua DPRD Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam menyoroti isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini tengah terjadi. Kondisi ini berdampak tidak hanya mengulangnya antrian di beberapa SPBU, namun juga kembali munculnya oknum-oknum penimbun dan pengetap BBM.

Menurut Politisi Partai Golkar tersebut, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani oknum-oknum pengetap dan penimbun BBM itu sudah tepat. Lantaran polisi sudah melakukan pengawasan dengan ketat dan ada tinda-

kan tegas langsung, saat mengetahui ada oknum yang ketahuan mengetap maupun menimbun.

"Memang kondisi saat ini mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk melakukan penimbunan. Semoga dengan apa yang dilakukan pihak kepolisian beberapa waktu lalu, dengan menangkap pelaku penimbunan BBM memberikan efek jera," ujarnya usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Senin (4/9/2023).

Namun begitu menurutnya, upaya untuk menghilangkan oknum-oknum pengetap dan penimbun ini memang agak sulit dan

tidak bisa semuanya diberantas. Lantaran berdampak pada piring nasi masyarakat.

Baginya, para pedagang-pedagang bensin eceran di pinggir jalan itu kondisi khusus dan masih bisa ditoleransi. Karena para pedagang bensin eceran masih mengambil harga yang wajar saat menjual bensin.

"Selama masih batas kewajaran, artinya selama masih menimbun dan mengambil dengan harga wajar, saya kira wajar aja karena hal itu dilakukan untuk piring nasi, bisa ada pengecualian," ungkapnya. (al/adv)



IST

Foto Ilustrasi pasar.

Inflasi Dampak Kenaikkan Harga BBM, Andi Faiz Sarankan Pemkot Buat Standar Acuan Harga

BONTANG – Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai berdampak ke beberapa sektor, salahsatunya kenaikan harga bahan pokok seperti beras. Kondisi inflasi ini pun dikeluhkan masyarakat yang mulai terdesak dengan himpitan ekonomi.

Ketua DPRD Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam mengatakan, bahwa upaya Pemkot Bontang dalam mengendalikan inflasi selama ini dirasa sudah cukup. Lantaran pemkot dalam hal ini Diskop UKMP sudah melakukan yang seharusnya dilakukan untuk mengontrol inflasi.

Tim monitoring inflasi daerah selalu memantau harga pasar. Apabila terjadi kenaikan harga akan mengupayakan untuk menggelar

operasi pasar murah. “Saya rasa inflasi di Bontang termonitoring dengan baik. Ketika ada indikasi kenaikan harga, tim dari Diskop UKMP segera turun untuk monitoring dan menormalkan harga-harga,” beber Andi Faiz.

Namun begitu menurutnya, ada satu hal lagi yang perlu dilakukan oleh Pemkot Bontang, yaitu membuat standar harga. Pemkot harus membuat standar acuan atau harga kewajaran dari yang namanya dampak kenaikan BBM.

“Hal itu supaya tidak membunuh pelaku usaha dan tidak mencekik masyarakat yang membeli, sehingga perputaran ekonomi di masyarakat bisa tetap berjalan,” pungkasnya. (al/adv)



IST

Ilustrasi icon wisata Bontang, Pulau Beras Basah.

Majukan Wisata, BW Sarankan Pemkot Bentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah

BONTANG – Promosi wisata menjadi salahsatu alternatif memajukan sektor pariwisata Bontang. Hal itu disuarakan Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang saat interupsi Rapat Paripurna, Senin (4/9/2023) lalu.

Menurut BW sapaannya, promosi wisata ini menjadi salahsatu cara mewujudkan visi Pemkot Bontang menjadikan Bontang sebagai kota wisata ke depannya.

Dirinya pun mendorong Pemkot Bontang agar membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD). BPPD diusulkan agar berfokus pada upaya promosi pariwisata, dengan tujuan mewujudkan Bontang sebagai destinasi pariwisata unggulan pasca industri.

Dikatakannya, beberapa kota di Indonesia sudah membentuk BPPD dan berhasil memajukan sektor pariwisatanya. Di antaranya, Salatiga,

Denpasar, Surakarta, Kendal, Gunung Kidul, Kulon Progo, Malang, dan kota-kota lainnya.

“Ini selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016. Kalau promosi wisata di Bontang ditingkatkan, saya yakin wisata kita akan banyak pengunjung dari berbagai daerah,” ujar BW.

Ia juga mengungkapkan, regulasi terkait promosi pariwisata di Bontang menjadi salah satu aspek yang sangat penting, dalam menyusun program-program kerja peningkatan pariwisata daerah untuk menarik minat para wisatawan ke Bontang.

“Kalau ada regulasinya dari Dispopar, saya yakin bisa lebih maksimal lagi dalam bekerja meningkatkan sektor wisata, sesuai dengan kebijakan yang berkaitan dengan peraturan wali kota,” imbuhnya. (al/adv)



IST

MS mendapat perawatan di RSUD Taman Husada.

Kuli Bangunan Kesetrum Listrik Tegangan Tinggi, Alami Luka Bakar

BONTANG – Seorang pekerja bangunan mengalami kejadian mengesankan. Kuli bangunan itu tersetrum listrik bertegangan tinggi saat sedang bekerja, Rabu (6/9/2023) sekira pukul 08.30 wita pagi.

Akibat insiden itu, kuli bangunan yang juga warga Gunung Telihan itu mendapat luka bakar.

Dijelaskan Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi melalui Kapolsek Bontang Barat Iptu Lukito, pria berinisial MS 41 tahun itu jatuh dari ketinggian 6 meter saat memasang baja ringan. Kemudian baja tersebut mengenai kabel lis-

trik hingga akhirnya muncul sebuah ledakan.

"Korban terbakar seujur tubuh, dan langsung terjatuh dari atas bangunan itu, dilihat sama saksi alias rekannya," ujar Iptu Lukito dikutip dari situs Polres-bontang.com.

Kini korban mengalami koma dan sudah menjalani tindakan operasi di RSUD Taman Husada Bontang.

"Kita tunggu perkembangan selanjutnya ya, korban masih menjalani perawatan medis," katanya.

Editor: Yusva Alam



IST

Korban terkena sengatan listrik saat dirawat di RSUD Taman Husada.

Korban Sengatan Listrik di Telihan Lewati Masa Kritis

BONTANG - Saat ini kondisi dari pekerja bangunan yang tersengat listrik bertegangan tinggi, Rabu (6/9/2023) kemarin saat bekerja sudah melewati kondisi kritis.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh redaksi, Kamis (7/9/23) ini korban berhasil melewati masa kritisnya.

Korban mengalami luka bakar sebanyak 40 persen, hal tersebut diungkapkan Dr. Tirta Ratna Pramita, Kabid Pelayanan Medik dan Pengendalian RSUD Taman Husada Bontang

"Korban telah melakukan operasi dan sudah sadarkan diri pada pukul 11.30 wita Rabu kemarin,"

Korban saat ini mengalami elektrolit atau gangguan yang biasa terjadi pada korban yang tersengat listrik seperti seperti detak jantung yang tidak teratur, diare, kram otot, tubuh lemas, dan kejang.

"Luka bakarnya meliputi seluruh ketebalan dermis dan epidermis di bagian dada, leher, tangan dan kaki," jelasnya.

Lebih lanjut, pihak RSUD melakukan pe-

mantauan kondisi korban yang kini berada di ruang ICU karena masih bisa terjadi infeksi, terganggunya pernapasan dan bengkak. Korban juga mengalami patah di bagian panggul kanan.

Diberitakan sebelumnya, kecelakaan kerja terjadi di salah satu bangunan rumah tepatnya di Jalan Soekarno Hatta RT 20 Kelurahan Gunung Telihan pada Rabu (7/9/23) kemarin.

Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi melalui Kasi Humas Polres Bontang Iptu Lilik Tribudiasih mengatakan, korban yakni MS(41) tahun diketahui sedang melakukan aktivitas pemasangan baja ringan yang berada di bagian atas, dekat dengan kabel listrik.

Setelah tersetrum, muncul sebuah ledakan, korban pun terjatuh dari ketinggian 6 meter, hal tersebut dilihat oleh rekan korban.

"Akibat dari itu, korban mengalami luka bakar sekujur tubuh," jelasnya

Penulis: Syakurah

Editor: Yusva Alam



**BATIK AIR TERBANG KE BERAU,
KARENA PERMINTAAN PASAR TINGGI**



Pendaratan pertama Batik Air di Bandar Udara Kalimantan, setelah sebelumnya berhenti beroperasi lantaran pandemik Covid-19.

BATIK AIR TERBANG KE BERAU, KARENA PERMINTAAN PASAR TINGGI

TANJUNG REDEB - Maskapai penerbangan Batik Air yang merupakan anak perusahaan Lion Air Group akhirnya memutuskan untuk mendaratkan pesawat berbadan besar di Bandar Udara Kalimantan Berau, Rabu (6/9/2023) lalu. Keputusan tersebut lantaran potensi pasar yang besar dan permintaan tinggi baik dari wisatawan maupun pebisnis.

Hal itu disampaikan oleh Corporate Communications Strategic Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro. Dikatakannya, keputusan Lion Air Group, termasuk Batik Air, untuk menyediakan layanan penerbangan dari dan ke Berau dipengaruhi oleh sejumlah faktor.

Diantaranya, potensi pasar di Berau mampu untuk Lion Air Group. Yakni, berdasarkan permintaan penumpang yang tinggi, baik dari wisatawan maupun pebisnis, serta kebutuhan konektivitas udara yang lebih baik di daerah tersebut.

Keputusan maskapai penerbangan sering kali didasarkan pada permintaan pelanggan. Jika ada permintaan yang kuat dari penumpang untuk rute tertentu, maskapai cenderung memper-

timbangankan untuk menyediakan layanan tersebut.

Berau juga termasuk sebagai pengembangan wilayah dan menjadi bagian dari rencana pengembangan wilayah di Kalimantan Timur. Perusahaan penerbangan sering kali tertarik untuk mendukung perkembangan wilayah dengan menyediakan layanan transportasi udara yang lebih baik.

"Konektivitas ke destinasi lain di Berau cukup strategis. Dapat berfungsi sebagai pintu gerbang untuk penumpang yang ingin bepergian ke destinasi lain di dalam dan luar negeri. Ini dapat menjadi peluang bisnis yang menarik bagi maskapai penerbangan," jelasnya, Kamis (7/9/2023).

Terkadang keputusan juga dipengaruhi oleh kemitraan atau kerjasama antara maskapai penerbangan dengan otoritas penerbangan atau pengelola bandara setempat. Kerjasama semacam ini dapat memberikan insentif dan dukungan untuk mengembangkan rute baru.

"Lion Air Group memiliki strategi bisnis untuk terus memperluas jaringan mereka, dan Berau

adalah salah satu destinasi yang masuk dalam rencana ekspansi mereka," ungkapnya.

Saat ini, Batik Air dikenal sebagai maskapai penuh layanan yang menawarkan berbagai kelas dan fasilitas kepada penumpangnya. Sebagai bagian dari Lion Air Group, Batik Air mempertimbangkan berbagai opsi dalam pengembangan bisnisnya, termasuk peluang untuk memasuki segmen pasar Jakarta-Berau dan Surabaya-Berau untuk target wisatawan dan pebisnis, sesuai dengan ada permintaan yang cukup kuat di pasar tersebut.

Komitmen Lion Air Group terhadap pengembangan bisnis selalu berubah sesuai dengan kondisi pasar, kebutuhan pelanggan, dan rencana jangka panjang perusahaan.

"Jika ada permintaan yang signifikan untuk penerbangan LCC ke Berau dan jika itu sejalan dengan strategi bisnis grup, Lion Air Group mungkin akan mempertimbangkan untuk membuka peluang masuknya maskapai LCC ke destinasi tersebut," tandasnya. (mnz/dez)

Pewarta: Amnil Izza
Editor: Dezwan



PENGRAJIN BERAU JUARA DI DEKRANASDA AWARD KALTIM

SAMARINDA - Dua pengrajin binaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Berau, menerima Anugerah Dekranasda Award Kaltim tahun 2023. Keduanya adalah Anasrudin, pengrajin ukir yang meraih juara pertama kategori kayu dan M. Shodik yang meraih juara harapan I kategori batik motif khas Kaltim.

Penghargaan dan trophy diserahkan langsung oleh Ketua Dekranasda Kaltim, Erni Makmur Hadi Mulyadi, pada ajang Dekranasda Award dan Fasilitasi Pelatihan Penguatan Industri Kerajinan Kaltim di Harris Hotel Samarinda, Kamis (7/9/2023).

Ketua Dekranasda Berau, Sri Aslinda Gamalis, yang turut hadir pada penyerahan Dekranasda Berau, mengaku bangga atas apa yang telah diraih oleh pengrajin

dari Bumi Batiwakkal. Prestasi ini ditegaskannya menunjukkan para pelaku industri kerajinan di Kabupaten Berau mampu bersaing dengan daerah lain. "Alhamdulillah dua pengrajin dari Berau kembali meraih Dekranasda Award di tahun 2023 ini," ungkapnya.

Untuk itu Sri Aslinda mendorong para pelaku industri mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Berau untuk terus meningkatkan kompetensi, menghasilkan produk yang memiliki keunikan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal sehingga memiliki nilai jual di pasaran. Menjadikan prestasi para pengrajin yang telah meraih Dekranasda Award sebagai motivasi untuk terus melakukan yang terbaik. Hal ini juga seiring dengan tema Dekranasda Agar Tahun 2023 pengembangan inova-

si dan kreasi untuk menciptakan produk kerajinan Kalimantan Timur yang berdaya saing.

Dekranasda Berau ditegaskannya akan terus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada para pengrajin, melalui berbagai kegiatan pelatihan dengan menghadirkan para pelatih profesional. Termasuk membantu pemasaran produk melalui berbagai kegiatan pameran tingkat regional hingga nasional. Terlebih Berau sebagai daerah pariwisata harus juga ditopang dengan peningkatan ekonomi kreatif melalui berbagai produk kerajinan daerah. "Kita terus fokus memberikan pendampingan agar setiap tahun agar para pengrajin yang mampu bersaing hingga ke tingkat regional bahkan nasional," pungkasnya. **(RN/Prokopim/dez)**



BERKAT EL NINO, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN, LANCAR



**DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG,
SEKRETARIS TP-PKK PASER:
NAMANYA JUGA TAHUN POLITIK**



Sinta Rosma Yenti

DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG, SEKRETARIS TP-PKK PASER: NAMANYA JUGA TAHUN POLITIK

PASER - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Paser memilih tak ingin menanggapi dugaan penyalahgunaan wewenang yang diarahkan kepada ketuanya, yakni Sinta Rosma Yenti, istri Bupati Paser, Fahmi Fadli.

Dikonfirmasi soal dugaan penyalahgunaan kekuasaan dengan meminta fotokopi KTP warga, Sekretaris TP-PKK Kabupaten Paser, Yola Yusuf, tak ingin menanggapi terlalu jauh. Bahkan dia berdalih, fenomena tersebut terjadi lantaran tahun politik.

"Namanya juga tahun politik, pasti apapun yang dilakukan disorot," kata Yola Yusuf, Rabu (6/9/2023).

Dikabarkan sebelumnya, Sinta Rosma Yenti tengah jadi sorotan jagat media sosial, lantaran diduga mengintruksikan kelompok ibu-ibu yang tergabung dalam Dasawisma dan Rukun Tetangga (RT) untuk mengumpulkan fotokopi KTP warga.

Permintaan pengumpulan fo-

tokopi KTP warga itu ditujukan sebagai bentuk dukungan terhadap istri Bupati Paser, Fahmi Fadli itu, yang akan maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Timur.

Perihal adanya cuitan dengan dilengkapi tangkapan layar yang diposting pada Minggu (3/9/2023) Yola telah melihatnya. "Sempat baca, tapi biasa saja saya menanggapi. Teman-teman (PKK) enggak ada juga yang komentar apa-apa dan enggak juga menanyakan," terang dia.

Katanya, saat ini TP-PKK fokus pada agenda atau kegiatan yang telah direncanakan. Disinggung adanya pesan berupa permohonan pengumpulan fotokopi KTP untuk syarat maju DPD RI, dia tak mengetahui adanya pesan tersebut melalui aplikasi percakapan singkat.

"Nah saya enggak tahu. Pesan itu ada yang kirim, saya enggak tahu juga sih, enggak ada juga yang nanya kepada saya. Kami (PKK) sih santai saja dan fokus

pada kegiatan yang sudah direncanakan," tutur Yola.

Kendati sudah mendapat konfirmasi dari pihak TP-PKK Kabupaten Paser, namun berbagai upaya untuk mendapatkan konfirmasi dari yang bersangkutan belum didapati media ini. Adapun upaya konfirmasi masih tengah dilakukan agar mendapat penjelasan yang lebih akurat.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa Sinta Rosma Yenti diduga mengancam akan memotong Dana Desa jika warga tidak memilihnya. Hal ini terungkap dari cuitan @mazzini_gsp yang mengunggah bukti keluhan masyarakat atas yang tidak diketahui identitasnya.

Sementara, terhadap adanya upaya penelusuran yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Paser, terhadap informasi tersebut, juga belum berbuah hasil. Atas kejadian ini, turut menggegerkan warga di media sosial.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Salah satu akses jalan penghubung Batu Engau-Tanjung Harapan

BERKAT EL NINO, PROSES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI PASER LANCAR

PASER - Fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normal yang memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum atau biasa disebut El Nino. Kondisi ini dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser untuk percepatan pembangunan.

Meski pengaruh El Nino berdampak negatif pada tingkat produktivitas pertanian, namun bagi Pemkab Paser, hal itu justru memperlancar proses pembangunan infrastruktur yang jadi keluhan masyarakat selama ini.

Salah satunya pembangunan infrastruktur jalan dari Kecamatan Batu Engau menuju Kecamatan Tanjung Harapan yang hingga kini lancar tanpa hambatan cuaca atau iklim. Jika sebelumnya jalur darat menuju Tanjung Harapan terbilang sulit, kini hal itu mudah diakses.

Apalagi, baru-baru ini Bupati Paser, Fahmi Fadli, menyempatkan diri untuk berkunjung ke Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan via darat. Pasalnya selama ini, untuk menuju

desa tersebut mengandalkan alternatif jalur laut.

"Sekarang akses dari Kerang (Batu Engau) ke Tanjung Aru sudah bisa lewat darat," kata Fahmi, Kamis (7/9/2023).

Untuk diketahui, akses dari Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau menuju Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan dahulu tidak dapat ditempuh via darat. Alternatifnya, warga terpaksa melewati perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk mencapainya.

Dengan tidak adanya akses jalan, kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik dan jaringan internet juga terkendala. Namun kini hal itu perlahan mulai teratasi. Meski belum mulus dengan baik, namun ke depan, terus dilakukan peningkatan jalan di daerah tersebut.

"Namun tentunya itu semua butuh proses, semua butuh perjuangan, dan semuanya butuh usaha yang keras," ucapnya.

Fahmi menyebut, peningkatan infrastruktur di Kabupaten Paser khususnya jalan, tengah

berproses "Progres jalan masih dilakukan, beberapa sudah dilaksanakan peningkatan jalan menggunakan beton perkerasan kaku (Rigid). Peningkatan dilakukan secara bertahap," ujarnya.

Untuk diketahui, khusus dari Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau menuju Desa Senipah, Kecamatan Tanjung Harapan, DPUTR Kabupaten Paser melangsungkan perbaikan di rias jalan yang dibagi menjadi 7 segmen.

Di antaranya, segmen Desa Kerang menuju Desa Mengkudu sepanjang 12,593 km, Desa Mengkudu-Desa Lomu dan Desa Pengguren sepanjang 7,566 km, Desa Pengguren-Desa Segendang dan Desa Keladen sepanjang 15,845 km.

Selain itu Desa Keladen menuju Desa Random sepanjang 11,943 km, Desa Random menuju Desa Tanjung Aru sepanjang 29,062 km dan segmen Desa Random menuju Desa Senipah sepanjang 5,599 km.

Pewarta : Bhakti Sihombin
Editor : Nicha Ratnasari

KORAN DIGITAL

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI JUMAT
8 SEP 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



**KECEWA PUTUSAN MK,
DAENG NAJA:
SIDANG TIDAK SAH**



**MUDA
DINAMIS
AMANAH**



**ARIE
WIBOWO**

CALEG DPRD KOTA SAMARINDA
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG



Telkomsel Branch Samarinda menggelar "Telkomsel One Fun Run 2023" di kota Samarinda, Sabtu (9/9/2023), dan kota Bontang pada Minggu (10/9/2023). Pendaftaran dibuka hingga 9 September 2023 atau selama kuota peserta masih tersedia dengan beragam pilihan paket pendaftaran.

RIBUAN PELANGGAN RAMAIKAN "TELKOMSEL ONE FUN RUN 2023" SAMARINDA & BONTANG

SAMARINDA – Mengedepankan konsistensi sebagai digital lifestyle telco yang terus membuka semua peluang melalui ragam solusi dan layanan gaya hidup digital bagi pelanggan, Telkomsel Branch Samarinda menggelar "Telkomsel One Fun Run 2023" yang akan berlangsung di kota Samarinda pada Sabtu 9 September 2023 malam pukul 19.00 Wita dan kota Bontang pada Minggu 10 September 2023 pagi pada pukul 06.00 Wita.

Ajang lari dengan jarak tempuh 6 kilometer ini dikemas dengan konsep fun run yang dapat diikuti pelanggan Telkomsel dan masyarakat umum.

"Lari merupakan favorit olahraga masyarakat dan mudah dilakukan setiap saat sehingga dapat diikuti semua kalangan. Dengan semangat bersama jadi terdepan, "Telkomsel One Fun Run 2023" yang berlangsung di kota Samarinda dan kota Bontang ini merupakan wujud nyata komitmen Telkomsel sebagai digital lifestyle telco dalam menggerakkan pola hidup sehat dan menciptakan dampak positif secara berkelanjutan bagi Indonesia. Kami berharap event ini mampu meningkatkan minat dan kesadaran berolahraga serta hidup sehat bagi masyarakat kota Samarinda dan Bontang," terang Riyadh Suganda selaku Manager Mobile Consumer Telkomsel Branch Samarinda dalam keterangan persnya, Kamis (7/9/2023).

Pendaftaran peserta dibuka hingga 9 September 2023 atau selama kuota peserta masih tersedia. Calon peserta yang ingin mendaftar nantinya dapat memilih beragam paket pendaftaran, mulai dari Paket 1 dengan biaya pendaftaran Rp25 ribu (doorprize, BIB, product sponsor). Paket 2 senilai Rp100 ribu (medali,

doorprize, BIB, product sponsor), Paket 3 senilai Rp125 ribu (jersey, medali, doorprize, BIB, product sponsor), Paket 4 senilai Rp200 ribu (jersey, medali, doorprize, BIB, product sponsor), serta Paket 5 senilai Rp900 ribu (hotel, jersey, medali, doorprize, BIB, product sponsor). Di kota Samarinda yang digelar Sabtu 9 September 2023 malam pukul 19.00 WITA berlangsung di Mall Lembuswana dengan rute menuju jalan S. Parman – A. Yani – Gelatik – Pramuka – M. Yamin.

Sedangkan di kota Bontang pada Minggu 10 September 2023 pagi pada pukul 06.00 WITA berlangsung di Ramayana Mall melalui rute jalan Ir. Suprpto – DI. Panjaitan – Awanglong – Mulawarman – Otista – MH. Tamrin. Lebih lanjut Riyadh mengatakan, bagi para peserta dari luar kota Samarinda dan Bontang, Telkomsel juga menghadirkan paket menginap di beberapa pilihan hotel seperti Hotel Puri Senyuir, Fox Lite Hotel, atau Royal Park Hotel.

Peserta yang ingin mengikuti event ini dapat melakukan pendaftaran di GraPARI Telkomsel Mall Lembuswana, Surya Phone, Yugo Mart, PHD M.Yamin (untuk kota Samarinda) dan Kantor SMI Ayani, GraPARI Telkomsel Bontang (untuk kota Bontang).

Selain itu, calon peserta juga dapat melakukan pendaftaran online pada tautan link berikut <https://tinyurl.com/TelkomselOneFunRun2023>. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun Instagram @tselsmd dan @tap_clusterbontang atau akun facebook @TselSamarinda. Para peserta juga berkesempatan meraih hadiah doorprize berbagai produk dari kontribusi partner sponsor. Sambil menikmati rangkaian event di event ini,

peserta jangan khawatir haus dan lapar karena hadir beragam tenant seperti Era Mart, Fitbar, Pizza Hut Delivery (PHD), Amanda Brownies, dan beberapa tenant beverage Milo, Pocari, Air Mineral BST, Cleo. Dapatkan pula penawaran terbaik yang hanya hadir dari Pegadaian, Mahkota Sport, Astra Motor, Perdana Elektronik, Enervon Active, Kaos Polos Bontang (KPB), Yellowmart, dan Pippo Photography serta beberapa community partner seperti Kelurahan Bontang Baru (BOBA Runners), Bots Runners Indonesia, Indorunners Balikpapan, SMDRUN, PPI Kaltim Runners, Bekantan Runners, dan Universitas Mulawarman. lainnya yang turut meramaikan. Peserta yang tak ingin kehilangan momen event ini dapat mengabadikan koleksi foto baik selfie dan wifienya, dan jangan lewatkan memiliki gadget terbaru yang tersedia di tenant Surya Phone dan Surya Cell. Adapun dukungan tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda, PMI Kota Samarinda dan PMI Kota Bontang serta pengamanan rute dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Polresta Kota Samarinda, Polres Kota Bontang, dan Korem 091 Aji Surya Natakesuma. Tak terkecuali dukungan lokasi penyelenggaraan event dari Mall Lembuswana Samarinda dan Ramayana Bontang.

"Masih terbuka kesempatan beberapa hari lagi buat pelanggan Telkomsel warga kota Samarinda dan Bontang yang ingin mengikuti event Telkomsel ini, kami mengajak semua untuk bergabung dalam keseruan Telkomsel One Fun Run 2023 6K Run", tutup Riyadh. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari

KECEWA PUTUSAN MK, DAENG NAJA SEBUT PROSES PERSIDANGAN TIDAK SAH



SAMARINDA – Salah satu anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI) Hasannuddin Rahman Daeng Naja, kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materiil terhadap UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang diajukannya

“Menurut saya, ada cacat proses dalam terbitnya putusan tersebut,” sebut pria yang akrab disapa Daeng Naja ini, kepada awak media.

Pria yang juga penulis puluhan buku hukum ini menyebutkan, lazimnya sebuah sidang, semestinya ada persidangan pembuktian dan pemeriksaan terhadap pemohon, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli juga dari pihak terkait.

“Dalam sidang gugatan yang saya ajukan, sama sekali tidak ada tindakan memeriksa dan mengadili, sebagaimana lazimnya sebuah peradilan. Yang ada hanya analisa hukum atas permohonan yang saya ajukan,” beber pria yang tinggal di Samarinda, Kaltim ini.

Dikatakan, hasil analisa para hakim itulah yang kemudian dijadikan putusan. “Wajar jika kemudian saya bertanya, mereka yang 9 orang itu hakim atau analis?” tanyanya.

Diketahui, Daeng Naja mengajukan uji materiil terkait dalam pasal 56 UU Nomor 41/2004 dan meminta mahkamah menyatakan pasal 56 UU 41/2004 bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan terkait masa jabatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diajukan menjadi menjadi lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Sementara, saat ini dalam pasal 56 UU 41/2004 berbunyi “Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Gugatan yang diajukan Daeng Naja bukan tanpa alasan. Ia mencontoh-

kan masa jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi yang awalnya 4 tahun kemudian disetujui oleh Mahkamah Konstitusi menjadi 5 tahun.

Atas dasar itu pula, Daeng Naja juga mengajukan gugatan agar masa jabatan anggota BWI juga menjadi 5 tahun, dan bisa diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Sementara pasal terkait masa jabatan yang hanya 3 tahun itu menurutnya bertentangan dengan UUD 1945. Namun MK menolak uji materiil UU Nomor 41 Tahun 2004 tersebut.

“Amar putusan, mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” demikian dikutip dari Ketua MK Anwar Usman dipantau dari kanal resmi Youtube Mahkamah Konstitusi, Rabu (30/8).

MK menyatakan tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma karena adanya perbedaan masa jabatan anggota di BWI, dengan anggota di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dalil pemohon yang mempersoalkan hak pemohon yang tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena masa jabatannya tidak 5 tahun, juga dinilai tidak ada kaitannya dengan pasal 56 UU 41/2004.

Menurut Mahkamah, perbedaan masa jabatan di setiap lembaga seperti BWI, BAZNAS, dan BPKH tidak serta merta dapat diartikan melanggar hak konstitusional warga negara atau bertentangan dengan UUD 1945. Karena hal tersebut ditentukan sesuai dengan dasar hukum pembentukannya, berdasarkan kebutuhan pengaturan masing-masing lembaga.

Terkait keluarnya putusan itu, Daeng Naja menyampaikan sempat mengikuti tiga kali sidang panel di MK. Menurutnya, persidangan yang ia ikuti sebanyak tiga kali terse-

but, belum layak disebut praktik peradilan.

“Sidang pertama, hanya pembacaan permohonan dari saya sebagai pemohon dan nasihat perbaikan permohonan dari hakim panel sebanyak 3 orang,” ujarnya. Kemudian pada sidang kedua, pembacaan permohonan yang telah diperbaiki sesuai nasihat.

“Nah setelah itu, pada sidang ketiga langsung pengucapan putusan. Peradilan macam apa ini?” tanyanya. Padahal, salah satu pasal dalam UU MK, menurut Daeng Naja disebutkan: “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Kemudian pasal lain menegaskan: “Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi.”

“Pada sidang gugatan yang saya ajukan itu, tidak ada sama sekali persidangan pembuktian. Tidak ada tindakan memeriksa dan mengadili, sebagaimana ketentuan UU MK tersebut,” bebarnya.

Yang ada menurut dia hanya analisa hukum atas permohonan yang ia ajukan. Hasil analisa para hakim inilah yang dijadikan putusan. “Jadi mereka yang sembilan orang ini, lebih layak disebut analis, bukan hakim, tambahanya.

Pada hal tersebut, harus ada sidang pembuktian termasuk untuk mendatangkan saksi dan ahli, pihak Pemerintah, DPR sebagai pembentuk Undang-undang atau lembaga-lembaga lainnya untuk memberikan keterangan.

“Jadi, putusan yang diambil hakim MK terhadap gugatan ini, bukan hanya tidak sah tetapi juga melanggar hukum,” pungkasnya. **(MK)**